

**PERAN CAMAT DALAM MENGOORDINASIKAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh :

Robi Mulyadi

(rmocu13@gmail.com)

Pembimbing :Drs. Erman Mochtar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 –
Telp/Fax. 0761 – 63277

ABSTRACT

This Study aimed to determine the role of Kampar district head in coordinate security and public order in the district of Kampar, Kampar regency. This study is focused on the district head of the Kampar because considering the district head given task is to coordinate the security and order. The issues of security and order in the district of Kampar had increase from 2012 to 2013. The role of district head's in coordinating security and public order in the district of Kampar which is based on the basic tasks of district head which has been mandated by law. In the implementation, there are still constraints faced by the district head in coordinating security and public order with the relevant agencies. Based on this background, the study and public order in the district of Kampar, and what are the factors of less optimal of district head's role in coordinating the implementation of security and public order in the district of Kampar, Kampar regency.

This research is descriptive in which research provides a description or picture of the phenomenon or social phenomenon studied by describing the independent variables systematically and accurately. Method of data collection is with In-depth interview and study documentation. The result of study indicate that the role of the district head's in coordinating security and public order in the district of Kampar, Kampar regency based on task assignment regulated by law. In the implementation inter-agency between the agencies found that there are lack of coordination with each other. Whereas, the synergy of each agency is required in the administration of public security and order in the district of kampar, Kampar regency.

Keywords : Role, District, Security and Public Order

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dilahirkan tentu dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah dalam segala bidang. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan merupakan bentuk pengakuan kepercayaan kepada daerah bahwa daerah bisa membangun daerahnya sendiri tanpa banyak campur tangan dari pemerintah pusat. Bebas membangun daerahnya sendiri.

Dengan adanya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan suatu pengakuan kepada daerah bahwa daerah dipercaya oleh pemerintah pusat untuk bisa membangun daerahnya dengan segala potensi yang ada. Dengan hal ini dalam mewujudkan otonomi daerah, pemerintah daerah harus di bentuk Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana yang telah diatur di Pasal 126 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah. Camat bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Camat bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Di samping menangani urusan otonomi daerah camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan seperti dijelaskan pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 126 (3), yakni diantaranya “Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum”.

Kecamatan Kampar merupakan salah satu kecamatan yang tergolong keamanan dan ketertiban umumnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana yang penulis terima dari Polsek Kampar Rekapitulasi Data Penyelidikan Yang Ditangani Oleh Polsek Kampar Tahun 2012 s/d 2013, bahwa dari tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi peningkatan tindak kejahatan atau kriminalisasi di daerah ini.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan peran camat dalam mengoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui peran camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurang mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Kerangka Teori

1. Koordinasi

Menurut Soewarno Hardiningrat (2000 : 88) koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Soewarno Hardiningrat (200 : 12) mengemukakan bahwa fungsi koordinasi adalah:

1. Merupakan salah satu fungsi manajemen disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan.
2. Merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dan berbagai kemampuan dalam organisasi.
3. Merupakan usaha mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari kesatuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan tugas organisasi.
4. Merupakan faktor dominan yang perlu dipertahankan bagi kelancaran hidup suatu organisasi.
5. Tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab,

Harold koonts (S.P. Siagian, 2005 : 124) bahwa dalam pelaksanaan koordinasi perlu diperhatikan dalam unsur pembagian pekerjaan tindakan koordinasi akan terarah dari berusaha untuk mencapai sasaran secara optimal diantaranya ;

1. Adanya rencana kerja

2. Adanya pertemuan-pertemuan
3. Adanya komunikasi
4. Adanya pembagian tugas kerja dan hubungan kerja

2. Peran

Menurut Soekanto peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), artinya seseorang telah berperan apabila telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran dan status tidak dapat dipisahkan karena saling ketergantungan, tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Peran dapat mencakup 3 (tiga) hal:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat;
- b. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat;
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Ketentraman dan ketertiban

Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar “tentram”, dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran) misalnya baru merasa

tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar dapat mendalami tentang permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang dipecahkan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, untuk mengetahui bentuk Koordinasi yang dilakukan oleh Camat Kampar.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (2) Data Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi objek penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian dan didukung dengan data observasi yang dilakukan penulis. Data yang diperoleh antara lain: Identitas informan, yang meliputi: Nama, Jabatan, Faktor yang menghambat koordinasi camat upaya keamanan dan ketertiban umum.

(2).Data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Strategi penentuan sumber informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model prosedur purposive. Prosedur purposive adalah salah satu strategi menentukan sumber informan yang paling umum dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi sumber informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis menetapkan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan | Ket |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Adnan.S.sos | Camat Kampar | 1 |
| 2 | H. Siri Husin, S.H | Sub. Bag Trantip kecamatan Kampar | 1 |
| 3 | AKP Arbain | Kapolsek Kampar | 1 |
| 4 | Doni Arianto | Kepala Desa Ranah | 1 |
| 5 | Miswardi | Kepala Desa Pulau Tinggi | 1 |
| 6 | Suhelmi | Kepala Desa Batu Belah | 1 |
| 7 | Zulhendri Zainur | Tokoh Masyarakat Airtiris | 1 |
| 8 | Abu Bakar | Tokoh Masyarakat Batu Belah | 1. |
| 9 | Muhammad Rohimi S.Sos | Tokoh Masyarakat Desa Ranah | 1 |
| Jumlah | | | 9 |

(Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2015)

Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik-teknik penelitian kualitatif dalam proses

pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu: (1) Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan mewawancarai informan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Wawancara yang akan dilakukan berupa wawancara mendalam guna mendapatkan informasi yang mampu menjelaskan mengenai permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini. (2) Observasi. Observasi merupakan strategi pengumpulan data dimana peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Observasi ilmiah merupakan suatu proses pencacatan yang sistematis terhadap perilaku orang, objek atau kejadian tersebut. Peneliti menggunakan metode observasi ini untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kejadian masa lalu melalui pengumpulan bukti-bukti yang ada berdasarkan proses pengamatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERAN CAMAT DALAM MENGOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Camat sebagai pemimpin Kecamatan harus mengoordinasikan seluruh aspek pemerintahan yang dipimpinnya agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum. Koordinasi merupakan aspek penting demi tercapainya tujuan organisasi, dan masing-masing unsur serta pihak yang ada dalam sebuah organisasi harus mengerti dan memahami apa itu koordinasi.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Camat Kampar tentang pengertian koordinasi, fungsi koordinasi serta pentingnya koordinasi dalam organisasi pemerintahan kecamatan.

“Koordinasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menyesuaikan atau mengatur bagian-bagian yang berbeda agar kegiatan dari bagian-bagian tersebut terlaksana efektif dan efisien, serta tercapainya tujuan bersama. Adapun fungsi dari koordinasi tersebut adalah suatu cerminan dari suatu organisasi tersebut, maksudnya baik buruknya hasil kerja dari suatu organisasi tergantung pada koordinasi yang dilakukan dalam organisasi tersebut agar bagian dalam organisasi memainkan perannya masing-masing yang telah ditugaskan. (Wawancara dengan Camat Kampar Bapak Adnan. S.Sos, pada Tanggal 15 September 2014 di Kantor Camat Kampar)

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi untuk keberlangsungan suatu organisasi yang baik. Serta koordinasi berperan agar bagian-bagian dari organisasi tersebut menjalankan fungsinya masing-masing.

Peneliti juga menanyakan tentang bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan selama ini.

“Sejauh ini kami melakukan koordinasi sesuai dengan panduan-panduan yang ada, kami melakukan rapat koordinasi dengan intern kecamatan setelah

apel senen pagi dan langsung saya sendiri yang memimpin rapat koordinasi tersebut. Kalau koordinasi dengan ekstern kecamatan kami lakukan sekali sebulan dan dilaksanakan diawal bulan. (Wawancara dengan Camat Kampar Bapak Adnan. S.Sos, pada Tanggal 15 September 2014 di Kantor Camat Kampar)

Camat kampar menjelaskan bahwa sejauh ini koordinasi yang dilakukan dikecamatan kampar, baik itu secara intern kecamatan maupun ekstern kecamatan yang terkait telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Dari wawancara diatas Camat kampar menyadari bahwa koordinasi merupakan suatu hal yang sangatlah diperlukan didalam organisasi terutama didalam organisasi pemerintahan karena ini menyangkut masyarakat ramai. Namun walaupun demikian koordinasi yang telah dilakukan tentunya masih ada juga kendala-kendala yang dihadapi.

Dalam pembahasan bab ini penulis menggunakan beberapa indikator dalam pengukuran pelaksanaan mengoordinasikan upaya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan kampar yaitu melalui :

1. Adanya pertemuan pertemuan

Dalam pelaksanaan koordinasi agar terjadiya sinkronisasi atau keselarasan dari pihak-pihak yang akan dikoordinir maka peranan daripada komunikasi dapat menunjang kelancaran tugas koordinator untuk menyatupadukan kegiatan yang sudah diprogramkan, dengan demikian jelas bahwa frekuensi pertemuan antara koordinator dengan orang-orang yang

dikoordinir perlu ditingkatkan. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat terlihat adanya penyimpangan program.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi dari data mengenai pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pihak kecamatan kampar, maka dapat dilihat dari wawancara berikut :

Pertemuan-pertemuan yang kita lakukan untuk melaksanakan koordinasi berupa rapat dilakukan 1 kali sebulan dengan seluruh kepala desa dan Kapolsek Kampar serta instasi pemerintahan yang berdomisili di Kecamatan Kampar. (Wawancara dengan Camat Kampar Bapak Adnan. S.Sos, pada Tanggal 15 September 2014 di Kantor Camat Kampar)

Koodinasi sangat memiliki peranan yang penting dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar, dimana dengan adanya pertemuan-pertemuan ini diharapkan dapat mengambil tindakan yang tepat dan menjadi bahan evaluasi dalam upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar. Untuk berikutnya hal ini senada dengan pendapat salah satu kepala desa di kecamatan kampar.

“rapat koordinasi ini memang sangat diperlukan untuk dilakukan dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar, sebab dengan dilakasanakan pertemuan-pertemuan maka akan adanya evaluasi dari pelaksanaan dan tindakan apa yang akan dilakukan dan desa mana saja yang akan menjadi desa yang

dianggap tidak aman. (Wawancara dengan Kepala Desa Ranah Doni Arianto, pada Tanggal 17 September 2014 di Kantor Desa Ranah)

Dalam pertemuan yang dilakukan melalui rapat setiap Kepala Desa memberikan laporan kepada Camat mengenai ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya gangguan tersebut maka di khawatirkan dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun bentuk laporan tersebut berkaitan dengan problem yang sedang dihadapi terhadap kenakalan remaja yang sudah mengkhawatirkan masyarakat.

Berikut wawancara dengan kepala Desa Batu Belah :

“Desa Batu belah merupakan desa yang dekat dengan Ibukota Kabupaten Kampar dan juga Batu Belah juga berada di pinggir jalan raya Pekanbaru-Bangkinang, hal ini menyebabkan pertukaran informasi masyarakat sangatlah mudah dengan masyarakat yang berada di Bangkinang. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang ada di ibukota Kabupaten tersebut bisa terbawa kedalam desa kami, baik itu dalam bidang positif apalagi yang negatif yang melanda remaja-remaja desa kami. Karena remaja sangat rentan terpengaruhi.” (Wawancara dengan Kepala Desa Batu Belah Bapak Suhelmi , pada Tanggal 16 September 2014 di Kantor Desa Batu Belah)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keresahan yang dirasakan oleh kepala desa Batu Belah juga adalah hasil keresahan dari masyarakat Batu Belah yang menyatakan desa mereka rentan sekali dengan kenakalan remaja, hal ini

dinyatakannya bahwa desa mereka dekat dengan ibukota kabupaten.

Hal ini diperjelas oleh salah satu pemuka masyarakat Desa Batu Belah :

“Remaja yang berada di desa sudah mulai mengkhawatirkan masyarakat bahwa remaja-remaja kami tersebut sudah tidak mengerti norma-norma, dan melaksanakan berbagai kegiatan yang meresahkan masyarakat seperti perjudian dan kebut-kebutan pakai sepeda motor. Hal ini tentunya membahayakan dirinya sendiri dan masyarakat. (Wawancara dengan pemuka masyarakat Bapak Abu Bakar, pada Tanggal 16 September 2014 di Rumahnya Batu Belah)

Dari hasil wawancara dengan pemuka masyarakat batu belah tersebut mempertegas apa yang dikatakan oleh Kepala Desa Batu Belah sebelumnya. Bahwa masyarakat telah mulai resah dengan apa yang dilakukan oleh para remaja yang berada di Desa mereka.

Hal senada juga diungkapkan oleh kepala Desa Ranah dan pemuka masyarakat Ranah:

“Masyarakat Desa kami telah resah akan gangguan keamanan di desa Ranah ini, gangguan keamanan yang diresahkan oleh masyarakat desa kami banyaknya pemakai narkoba di desa kami. Hal ini tentunya berdampak buruk kemudian hari. Maka dari itu hal ini perlu kami laporkan kepada pihak kecamatan supaya adanya perhatian lebih dari pemerintah atas hal yang warga kami rasakan. (Wawancara dengan Kepala Desa Ranah Doni Arianto, pada Tanggal 17 September 2014 di Kantor Desa Ranah)

“Desa Ranah telah menjadi cover kenakalan remaja di kecamatan kampar, dan ini menjadi suatu

keresahan bagi masyarakat kami, dan harus ada sebuah antisipasi dari pemerintah untuk meminimalisir keadaan ini. (Wawancara dengan Pemuka Desa Ranah Rohimi S.Sos, pada Tanggal 17 September 2014 di Desa Ranah)

Dengan adanya laporan, maka pihak Kecamatan memberikan langkah maupun upaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

“Setiap gangguan keamanan dan ketertiban umum dalam bentuk apapun dan jika tidak bisa diselesaikan oleh aparat desa, maka kami akan melaporkannya atau menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak Kecamatan dengan memberikan laporan agar dapat ditindaklanjuti”. (Wawancara dengan Kepala Pulau Tinggi Bapak Miswardi., pada Tanggal 17 September 2014 di Kantor Desa Pulau Tinggi)

2. Adanya komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai komunikasi dalam peran Camat mengoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

“Komunikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dengan kepala desa yang berada di kecamatan kampar dan dengan Polsek kampar serta dengan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum ini telah terlaksana dengan semana mestinya, seperti kami telah lakukan berupa pertemuan-pertemuan melalui rapat dan setiap kepala desa melaporkan apa yang menjadi keresahan masyarakat dalam

hal keamanan dan ketertiban umum ini. (Wawancara dengan Camat Kampar Bapak Adnan. S.Sos, pada Tanggal 15 September 2014 di Kantor Camat Kampar)

Hal ini senada yang dijelaskan oleh salah satu pemuka masyarakat kecamatan kampar sebagai berikut :

“Kami merasakan apa yang dilakukan oleh Camat Kampar bahwa dia memberikan sebuah himbauan kepada masyarakat agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban umum. (Wawancara dengan pemuka masyarakat Bapak Zuhendri Zainur, pada Tanggal 19 September 2014 di Kantor Camat Kampar)

Dalam melakukan komunikasi secara tidak langsung pihak kecamatan tidak lah sendirian dalam melaksanakan hal yang demikian. Pihak Polsek Kampar juga melakukan hal yang demikian seperti wawancara penulis berikut.

“Bentuk kepedulian kami dengan keamanan dan juga merupakan tugas kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum ini kami juga melakukan himbauan kepada masyarakat Kampar agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Hal ini kami lakukan dengan memasang spanduk di tiap tiap masjid dan spanduk yang serupa kami pasang di hampir tiap-tiap Desa di kecamatan kampar:” (Wawancara dengan Kapolsek Kampar Bapak AKP Arbain , pada Tanggal 18 September 2014 di Kantor Polsek Kampar)

3. Adanya pembagian tugas dan hubungan kerja

Kesatuan tindakan yang dilakukan Camat adalah dengan menciptakan

suatu petunjuk atau pedoman tugas guna terciptanya pembagian tugas yang baik dan tiadanya tugas yang tidak terlaksanakan, pedoman pembagian tugas ini disebut dengan Nota Dinas. Nota Dinas merupakan alat komunikasi intern antar pejabat satuan organisasi yang membuat berisi pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan dsb; surat resmi yang bersangkutan dengan organisasi atau instansi tersebut. Hal ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang yang dijalani oleh masing-masing pegawai. Sedangkan pembagian tugas dan hubungan kerja yang dilakukan oleh Camat Kampar dalam upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya adalah koordinasi dalam bentuk diadakannya rapat, dan dengan diadakan rapat tersebut dapat mencapai suatu kesatuan tindakan melalui musyawarah sehingga pembagian kerja dan hubungan kerjanya jelas. Akan tetapi hal ini dirasa kurang efektif, karena pada waktu diadakan rapat atau pertemuan-pertemuan, tidaklah semua wakil dari instansi serta aparat desa yang dapat hadir.

“pembagian tugas dan hubungan kerja ini perlu sebab disini akan terciptanya suatu kesatuan tindakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban ini, namun kendalanya adalah tidaklah semua aparat desa dan instansi yang berkaitan dapat hadir dalam rapat yang dilaksanakan tersebut disebabkan berbagai keperluan yang dihadapinya.” (Wawancara dengan Camat Kampar Bapak Adnan. S.Sos, pada Tanggal 15 September 2014 di Kantor Camat Kampar)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa ketidakhadiran sebagian dari aparat desa dan instansi yang terkait menjadi kendala untuk

melakukan koordinasi yang diharapkan agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban umum ini.

4. Adanya rencana kerja

Selain dalam bentuk rapat dan pertemuan yang diadakan dalam upaya melakukan koordinasi sebaiknya Camat menciptakan suatu rencana kerja atau juga peraturan yang mengatur seluruh masyarakat demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum.

“Selama ini tidak ada aturan yang mengatur khususnya dalam hal keamanan dan ketertiban umum ini secara langsung yang di keluarkan oleh Camat kepada masyarakat selain dari peraturan ataupun program yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.” (Wawancara dengan Sub.Bag Trantip Bapak H. Siri Husin, S.H, pada Tanggal 15 September 2014 di Kantor Camat Kampar)

Penjelasan diatas merupakan bentuk harapan agar adanya suatu aturan khusus yang mengatur ketentraman dan ketertiban umum dikalangan masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengatur secara khusus setiap unsur kehidupan masyarakat, namun tidak semua masyarakat dapat memahami hal tersebut, hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya sosialisasi dari setiap peraturan yang ada atau kurangnya pemahaman masyarakat serta minimnya sumber daya dari aparat sebagai pelaksana peraturan.

“Sejauh ini kami tidak ada mengeluarkan peraturan yang mengikat kepada masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, namun dalam rencana kerja kami mengeluarkan hanya sekedar himbauan kepada seluruh masyarakat kita dalam 1 kali dalam 6 bulan agar menjaga ketertiban dan ketentraman dalam

bermasyarakat. Dengan dilakukan hal ini diharapkan masyarakat dapat merasakan hal yang diinginkan bersama yakni rasa aman". (Wawancara dengan Camat Kampar Bapak Adnan. S.Sos, pada Tanggal 15 September 2014 di Kantor Camat Kampar)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Kecamatan Kampar memanglah tidak pernah mengeluarkan suatu peraturan yang mengikat bagi masyarakat, namun hanya melakukan sebuah himbauan atau disebut juga nota dinas kepada masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurang Optimalnya Peran Camat Dalam Mengoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban selalu harus di jaga demi kelancaran pekerjaan. Berdasarkan definisi tersebut pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah dan orang-orang tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku yang menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya peran Camat Kampar dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum di kecamatan kampar adalah :

1. Faktor internal
 - a. Tidak adanya kewenangan secara langsung yang dimiliki oleh Camat untuk membukatkan sanksi kepada setiap pelanggaran yang terjadi, karena Camat hanyalah menjalankan wewenang dari kepala daerah (Bupati)
 - b. Sering terjadinya pergantian pejabat atau mutasi Camat dan pejabat Eselon yang menjadi pimpinan yang menangani masalah yang terjadi.
 - c. Terlalu banyanya masalah yang ditangani oleh Camat sehingga kurang optimalnya penanganan mengenai suatu permasalahan.
2. Faktor eksternal
 - a. Kurang partisipasi aparat desa dan instansi yang ada pada Pemerintahan Kecamatan untuk berkoordinasi dengan mengikuti rapat atau pertemuan yang diadakan oleh Kecamatan.
 - b. Peran serta masyarakat yang menjadi salah satu hal mempengaruhi kurang optimalnya peran Camat, sebab masyarakat hanya bisa mengeluh dengan apa yang terjadi tanpa bertindak untuk

menangani ketidak
amanan tersebut.

Terciptanya koordinasi yang baik tentunya akan mempermudah terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dikalangan masyarakat yang juga merupakan tujuan dari organisasi. Koordinasi tidaklah terlepas dari adanya komunikasi yang baik sehingga hal ini juga menjadi faktor yang turut mendukung dan mempengaruhi bagaimana peran Camat dalam mengadakan koordinasi kepada bagian yang dikoordinasinya. Komunikasi yang baik akan menghasilkan koordinasi yang baik. Dengan perkembangan teknologi dapat pula mendukung kelancaran komunikasi.

Komunikasi dalam organisasi merupakan salah satu tanggung jawab pemimpin. Dalam organisasi yang strukturalnya berkembang akan terdapat pelbagai masalah komunikasi, hal ini bisa disebabkan karena perbedaan fungsi dan kepentingan setiap orang. Peran pemimpin sebagai komunikator dalam koordinasi sangatlah penting karena pemimpin yang akan menentukan arah untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang dimaksud adalah bagaimana peran Camat mempengaruhi individu melalui komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Koordinasi tidak akan pernah berjalan tanpa adanya komunikasi yang baik diantara unsur pelaksana koordinasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, bahwa penulis dapat menyimpulkan bahwa;

1. Peran camat kampar dalam mengoordinasikan keamanan

dan ketertiban umum berdasarkan tugas umum camat terkait di wilayah kecamatan kampar. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Kampar khususnya camat yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja di kecamatan menjadi suatu masalah yang paling besar dihadapi oleh camat kampar dalam hal keamanan, seperti yang telah dibahas dipembahasan bahwa narkoba dan berbagai masalah lainnya ini berujung pada remaja

2. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya kinerja camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum ini dapat diidentifikasi menjadi dua yaitu tidak adanya wewenang camat dalam membuat sanksi untuk setiap pelanggaran yang terjadi. Dan juga kendala juga didapatkan oleh camat tidak setiap kepala desa menghadiri rapat koordinasi yang dilakukan oleh camat.

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terdapat di kecamatan kampar khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban umum yang semakin menjadi-jadi serta melihat faktor-faktor yang menjadi kurang optimalnya kinerja camat, maka penulis menyatakan bahwa kurang optimalnya peran camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di kecamatan kampar.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka peneliti berusaha memberikan

saran sebagai guna meningkatkan peran camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

1. Peran camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum haruslah ditingkatkan, dalam hal ini camat haruslah tegas kepada pelanggaran baik itu kepala desa atau instansi yang terkait dalam mengoordinasikan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum ini.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban ini sangatlah diperlukan.

DAFTAR PUTAKA

Buku :

Budiono B. 1999. *Pelayanan Prima*. Jakarta, Yayasan Kawula Muda Indonesia.

Bruce J.Cohen. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta

David Berry. 1995. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Dwi Narwoko, Suryanto Bagong. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

Hadiningrat, Soewarno, (2000). *Pengantar Ilmu dan Administrasi*

Manajemen, PT Gunung Agung, Yogyakarta.

Kodoatie, J. Robert (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Koonzt, Harold dan Cyril.O'Donnell (1989), *Manajeme*, Erlangga, Jakarta

Martin Albrow, *Birokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet.3, 2004.

Moekijat, (1994). *Koordinasi (suatu Tinjauan Teori)*, Mandar Maju, Bandung.

Ndraha, Taliziduhu, (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*2. Rineka Cipta, Jakarta.

Paul B. Horton, Chester L. Hunt. 1984. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

Ryadi dan Bratakusumah, Deddy S, (2004). *Perencanaan Daerah (Menggali Potensi Dalam Mewujudkan OTONOMI DAERAH)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sedjarwo, (2001), *Metode Penelitian Sosial*. CV. Mandar Maju, Bandung.

Siagian, Sondang P, (1979), *Filsafat Administrasi*, PT Gunung Agung, Jakarta.

_____ (2005), *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soepomo, (2006), *Koordinasi dan Hubungan Kerja*. LAN RI, Jakarta

Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..

Soetarto, (1992), *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Suyanto Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Peraturan dan Undang-Undang :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Sumber : Sripsi dan Jurnal

Reski Lestari, 2015. *Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengelolaan DAS Siak; Studi Kasus Daerah Hilir DAS Siak Tahun 2012-2013*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Jumaidi Husin Irkami. 2014. *Peran Pemerintah daerah dalam pengembangan desa tertinggal di kecamatan rupa kabupaten bengkalis tahun 2012*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Riau.

Bahan Bacaan Lain

Pemerintah Kabupaten Kampar. *Data Monografi Kecamatan*. Tahun 2010

Bangkinang Terkini, *Kecamatan Kampar Rawan Narkoba*. Rabu, 20 Maret 2013. Halaman 17.

Riaupos.co, *Jerat Narkoba di Kampung Keramba*. Ahad 22 September 2013.

_____, *Siswa Diduga Cabuli Pelajar*. Rabu, 19 September 2012

_____, *Polisi Tangkap DPO Penganiayaan Anak*, Rabu, 23 januari 2013